

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG
LEBONG
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT ISIAN DAN PROSEDUR PENDATAAN
IDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I.1. FORMAT ISIAN

A. DATA SURVEYOR

Nama Surveyor :

Jabatan :

Alamat :

No. Telp. :

Hari/Tanggal Survei :
.....

B. DATA RESPONDEN

Nama Responden :
.....

Jabatan :

Alamat :

No. Telp. :

Hari/Tanggal Pengisian :
.....

C. DATA UMUM LOKASI

Nama Lokasi :

Luas Area :

Koordinat :

Demografis:

Jumlah Jiwa :

Jumlah Laki-Laki :
.....

Jumlah Perempuan :
.....

Jumlah Keluarga :
.....

Administratif:

RW :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

Permasalahan :

Potensi :

Tipologi :

Peta Lokasi :

D. KONDISI BANGUNAN

1. Ketidakteraturan Bangunan

Kesesuaian bentuk, besaran, perletakan dan tampilan bangunan dengan arahan RDTR

76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Kesesuaian tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dengan arahan RTBL

76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidak-
teraturan bangunan pada lokasi.

.....

Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan penataan bangunan

.....
.....

2. Tingkat Kepadatan Bangunan

Nilai KDB rata- :

rata bangunan

Nilai KLB rata- :

rata bangunan

Nilai Kepadatan :

bangunan rata-

rata

Kesesuaian

tingkat

kepadatan

bangunan (KDB,

KLB dan

kepadatan

bangunan)

dengan arahan

RDTR dan RTBL

76% - 100% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan

51% - 75% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan

25% - 50% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi.

.....
.....

3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan

Persyaratan bangunan gedung yang telah diatur

	pengendalian dampak lingkungan
	pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum
	keselamatan bangunan gedung
	kesehatan bangunan gedung
	kenyamanan bangunan gedung
	kemudahan bangunan gedung

Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman

	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan pada lokasi.

.....
.....

Mohon dapat dilampirkan Dokumen yang menjadi rujukan persyaratan teknis bangunan

.....
.....

E. KONDISI JALAN LINGKUNGAN

1. Cakupan Jaringan Pelayanan

Lingkungan Perumahan
dan Permukiman yang
dilayani oleh Jaringan
Jalan Lingkungan

	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan

Mohon dapat dilampirkan 1 gambar / peta yang memperlihatkan jaringan jalan lingkungan pada lokasi.

.....
.....

2. Kualitas Permukaan Jalan

Jenis permukaan jalan

	jalan perkerasan lentur
	jalan perkerasan kaku
	jalan perkerasan kombinasi
	jalan tanpa perkerasan

Kualitas permukaan jalan

	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
	51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
	25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk (rusak).

.....
.....

F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

1. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum

Akses aman terhadap air minum (memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa)

76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman

51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman

25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air minum yang dapat diakses masyarakat.

.....
.....

2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

Kapasitas pemenuhan kebutuhan (60 L/hari)

76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya

51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya

25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurang terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi.

.....

.....

G. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN

1. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air

Genangan yang terjadi

--

lebih dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)

--

kurang dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)

Luas Genangan

76% - 100% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun

51% - 75% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun

25% - 50% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan genangan pada lokasi tersebut (bila ada).

.....

.....

2. Ketidaktersediaan Drainase

saluran tersier dan/atau
saluran lokal pada
lokasi

76% - 100% area tidak tersedia
drainase lingkungan

51% - 75% area tidak tersedia
drainase lingkungan

25% - 50% area tidak tersedia
drainase lingkungan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan saluran tersier
dan / atau saluran lokal pada lokasi.

.....
.....

3. Tidak Terpeliharanya Drainase

Jenis pemeliharaan saluran
drainase yang dilakukan

Pemeliharaan rutin

Pemeliharaan berkala

Pemeliharaan drainase
dilakukan pada

76% - 100% area memiliki drainase
lingkungan yang kotor dan berbau

51% - 75% area memiliki drainase
lingkungan yang kotor dan berbau

25% - 50% area memiliki drainase
lingkungan yang kotor dan berbau

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi.

.....

.....

4. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan

Komponen sistem drainase yang ada pada lokasi

☐

Saluran primer

☐

Saluran sekunder

☐

Saluran tersier

☐

Saluran Lokal

Ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya

☐

76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya

☐

51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya

☐

25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya pada lokasi.

.....

.....

5. Kualitas Konstruksi Drainase

Jenis konstruksi drainase

Saluran tanah

Saluran pasang batu

Saluran beton

Kualitas Konstruksi

76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas konstruksi drainase yang buruk pada lokasi.

.....

H. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem pengolahan air limbah tidak memadai (kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik / IPAL)

	76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis
	51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis
	25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 dokumen memperlihatkan / menjelaskan sistem pengelolaan air limbah pada lokasi.

.....

.....

2. Prasarana dan Sarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah yang Ada Pada Lokasi

	Kloset Leher Angsa Yang Terhubung Dengan Tangki Septik
	Tidak Tersedianya Sistem Pengolahan Limbah Setempat atau Terpusat

Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah dengan persyaratan teknis		76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
		51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
		25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kondisi prasarana dan sarana pengolahan air limbah pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

.....

I. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan Sarana Persampahan yang Ada Pada Lokasi		Tempat Sampah
		tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R
		gerobak sampah dan/atau truk sampah
		tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan

Ketidaksesusian Prasarana dan Sarana Persampahan dengan Persyaratan Teknis		76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
		51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
		25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing prasarana dan sarana persampahan pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

.....

2. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem persampahan
 (pemilahan, pengumpulan,
 pengangkutan, pengolahan)

	76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
	51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
	25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dan sarana persampahan pada lokasi.

.....
.....

3. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Jenis pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang dilakukan

Pemeliharaan rutin
Pemeliharaan berkala

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan dilakukan pada

76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara
51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara
25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi.

.....
.....

J. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN

1. Ketidaktersediaan Sistem Proteksi Secara Aktif dan Pasif

Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada		Pasokan air untuk pemadam kebakaran
		jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran
		sarana komunikasi
		data tentang sistem proteksi kebakaran
		bangunan pos kebakaran

Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran		76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
		51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
		25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing sistem Proteksi kebakaran pada lokasi/

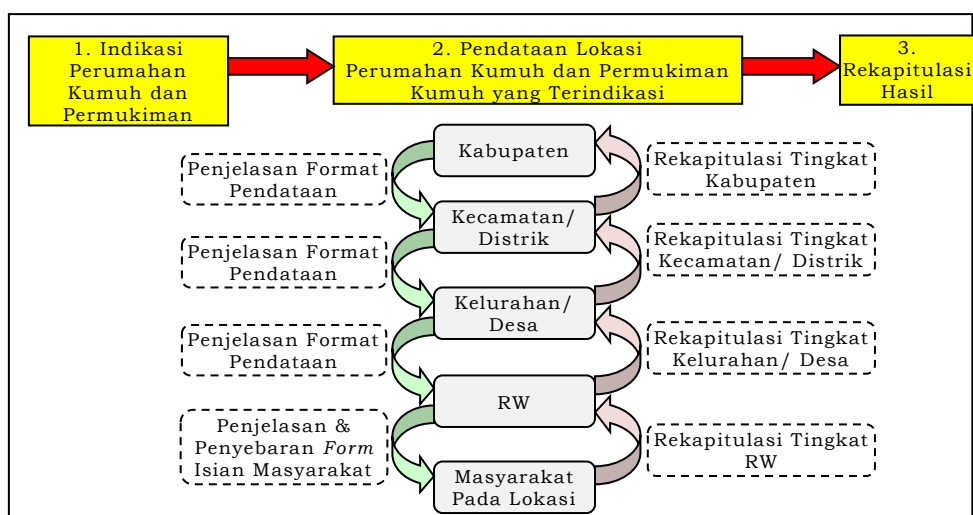
.....

2. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada		Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
		mobil pompa
		mobil tangga
		peralatan pendukung lainnya

Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran		76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
		51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
		25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang sumber pasokan air untuk pemadaman di lokasi.		

I.2. PROSEDUR PENDATAAN



BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

H. AHMAD HIJAZI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,

MAX PINAL, SH.M.Si
Pembina / IV.a
NIP. 19680511 200212 1 004

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG
LEBONG
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

FORMULASI PENILAIAN LOKASI
DALAM RANGKA PENDATAAN IDENTIFIKASI LOKASI
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

II.1. FORMULASI KRITERIA, INDIKATOR DAN PARAMETER

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN					
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	•Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona;	•76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi
			•51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		dan/atau •Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.	•25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	•KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; •KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau •Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi,	•76% - 100% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan •51% - 75% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai	5 3	Dokum en RDTR & RTBL, Dokum en IMB, Format Isian, Peta Lokasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		yaitu:	ketentuan	1	
		<ul style="list-style-type: none"> o untuk kota metropolitan dan kota besar ≥ 250 unit/Ha o untuk kota sedang dan kota kecil ≥ 200 unit/Ha 	<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 		
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan:	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 	5	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi
		<ul style="list-style-type: none"> • pengendalian dampak lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 	3	
		<ul style="list-style-type: none"> • pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum • keselamatan bangunan gedung • kesehatan bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		gedung •kenyamanan bangunan gedung •kemudahan bangunan gedung			
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	•76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			•51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3	
			•25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1	
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau	•76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			•51% - 75% area	3	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		permukiman	memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk		si
			•25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1	
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketidakterseediaan Akses Aman Air Minum	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	•76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			•51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3	
			•25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	b. Tidak Terpenuhi a. Kebutuhan Air Minum	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	•76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			•51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3	
			•25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1	
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan	•76% - 100% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			•51% - 75% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x	3	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		terjadi lebih dari 2 kali setahun	setahun	1	
			•25% - 50% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun		
	b. Ketidakterse diaan Drainase	Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan atau permukiman, yaitu saluran tersier dan/atau saluran lokal	•76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			•51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan	3	
			•25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan	1	
	c. Ketidakterh ubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan	•76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			•51% - 75% drainase	3	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		menimbulkan genangan	lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya		
			•25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1	
	d. Tidak Terpeliharaan ya Drainase	Tidak dilaksanakannya pemeliharaan saluran drainase lingkungan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik:	•76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			•51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	3	
			• pemeliharaan rutin; dan/atau		
			• pemeliharaan berkala		
			•25% - 50% area memiliki drainase lingkungan	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	yang kotor dan berbau		
			•76% - 100% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			•51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	3	
			•25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	1	
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai,	•76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS,

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	Teknis	yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	•51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3	Observasi
			•25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1	
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana:	•76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
		• kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik;	•51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3	
		• tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	•25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
			persyaratan teknis		
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu:	• 76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
		• tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;	• 51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3	
		• tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) pada skala lingkungan;	• 25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1	
		• gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala			

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		lingkungan; dan • tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.			
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:	•76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
		• pewadahan dan pemilahan domestik;	•51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3	
		• pengumpulan lingkungan; • pengangkutan lingkungan; • pengolahan lingkungan	•25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1	
	c. Tidak terpeliharanya Sarana dan Prasarana	Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana dan prasarana	•76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak	5	Wawancara, Format Isian, Peta

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	Pengelolaan Persampahan	pengelolaan persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik: <ul style="list-style-type: none"> • pemeliharaan rutin; dan/atau • pemeliharaan berkala 	terpelihara		RIS, Observasi
			•51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	3	
			•25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	1	
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidakterseediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • pasokan air; • jalan lingkungan; • sarana komunikasi; • data sistem proteksi kebakaran lingkungan; dan • bangunan pos kebakaran 	•76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			•51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3	
			•25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILA I	SUMBER DATA
	b. Ketidakterse diaan Sarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu:	•76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	Wawanc ara, Format Isian, Peta RIS, Observa si
		• Alat Pemadam Api Ringan (APAR);	•51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3	
		• mobil pompa; • mobil tangga sesuai kebutuhan; dan • peralatan pendukung lainnya	•25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1	
B. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN					
7. PERTIMBAN GAN LAIN	a. Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada:	•Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten	5	Wawanc ara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observa si
		• fungsi strategis kabupaten; atau • bukan fungsi strategis kabupaten	•Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten	1	
	o.Kependudu kan .	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan	Untuk Metropolitan & Kota Besar •Kepadatan	5	Wawanc ara, Format Isian,

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		<p>yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; • potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat 	<p>memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara</p>		

C. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN

8. LEGALITAS LAHAN	1. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	<p>Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kepemilikan sendiri, dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan 	(+)	Wawancara, Format Isian, Dokum
---------------------------	--------------------------------------	---	---	-----	--------------------------------

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau • kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan	lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain • Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain		en Pertama han, Observasi
	2. Kesesuaian	Kesesuaian terhadap	• Keseluruhan lokasi berada	(+)	Wawancara,

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILA I	SUMBER DATA
	RTR	peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK).	pada zona peruntukan perumahan/per mukiman sesuai RTR •Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/per mukiman sesuai RTR	(-)	Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi

II.2. FORMULASI PENILAIAN, BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI DAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN

NILA I	KETERANGA N	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																	
		A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	C	C	C	C	C	C
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Kondisi Kekumuhan																			
71 – 95	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
45 – 70	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
19 – 44	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X

NILA I	KETERANGA N	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																	
		A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	C 1	C 2	C 3	C 4	C 5	C 6
Pertimbangan Lain																			
7 – 9	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X					X	X					X	X				
4 – 6	Pertimbangan Lain Sedang			X	X					X	X					X	X		
1 – 3	Pertimbangan Lain Rendah					X	X					X	X					X	X
Legalitas Lahan																			
(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status Lahan Tidak Legal		X		X		X		X		X		X		X		X		X

SKALA PRIORITAS	1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9
PENANGANAN =																		

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

H. AHMAD HIJAZI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,

MAX PINAL, SH.M.Si
Pembina / IV.a
NIP. 19680511 200212 1 004

LAMPIRAN III

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG
LEBONG**

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH**

**FORMAT KELENGKAPAN PENETAPAN LOKASI
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH**

III.1. FORMAT KEPUTUSAN BUPATI



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG

NOMOR : TAHUN

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
- b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2015 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kabupaten yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;
- KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2015 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

- KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Rejang Lebong ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Penanganan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Rejang Lebong, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;
- KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Rejang Lebong meliputi sejumlah ... (*terbilang*) lokasi, di ... (*terbilang*) kecamatan, dengan luas total sebesar ... (*terbilang*) hektar;
- KELIMA : Penjabaran mengenai Daftar Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Rejang Lebong dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I; Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Rejang Lebong dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II; serta Profil Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Rejang Lebong dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III, dimana ketiga lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEENAM : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Rejang Lebong ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

BUPATI REJANG LEBONG

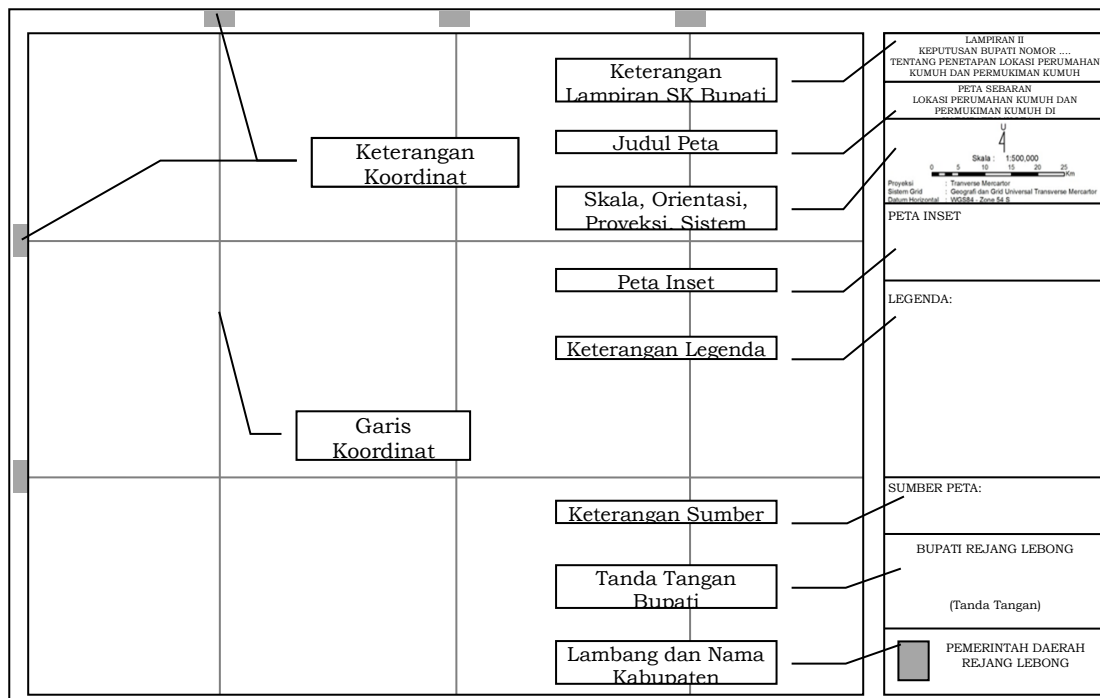
t.t.d.

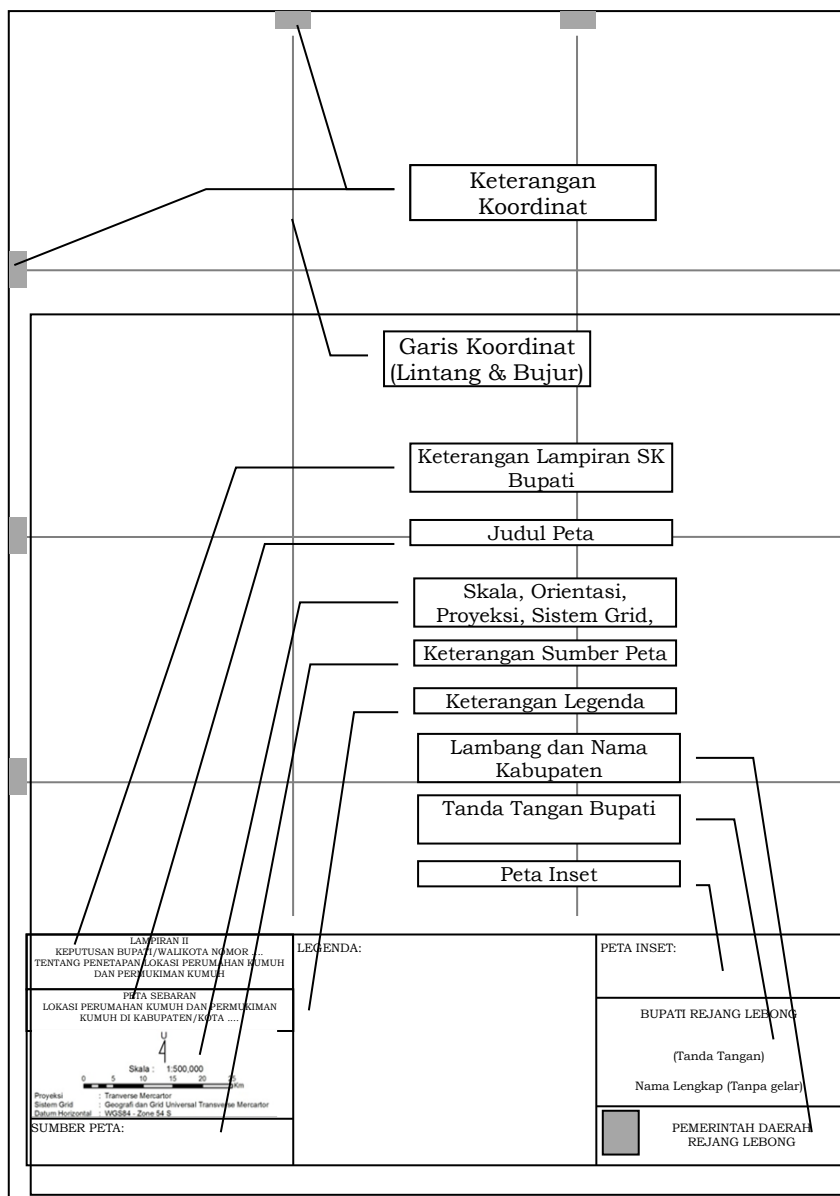
(NAMA LENGKAP TANPA GELAR)

III.2. FORMAT TABEL DAFTAR LOKASI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN REJANG LEBONG															
NO	NAMA LOKASI	LUAS	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT .LAIN		LEGALITAS LAHAN	PRIORITAS
			RT/ RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN/ DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		

III.3. FORMAT PETA SEBARAN LOKASI LOKASI





BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

H. AHMAD HIJAZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,

MAX PINAL, SH.M.Si

Pembina / IV.a

NIP. 19680511 200212 1 004

